

Interaksi Sosial Kepala Desa dan BPD dalam Perspektif Sosiologi Pedesaan

Nowo Heriyono¹, Mahendra Wijaya², Bagus Haryono³

Program Studi S2 Sosiologi, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
Jln. Ir. Sutami No.36A Surakarta 57126

nowo.heriyono@student.uns.ac.id¹, mahendrawijaya@staff.uns.ac.id², bagus.sosiologi01@gmail.com³

Abstract: Strategies to increase the effectiveness of interactions include open and transparent communication, respecting each other's roles and functions, and building trust and cooperation. The village head and BPD are the two main pillars of village government administration. Effective social interaction between the two is very important to realize good village governance. This research uses a rural sociology approach to analyze social interactions between village heads and BPD. Using qualitative methods, the research location was in Tanjungharjo Village, Kapas District, Bojonegoro Regency, East Java Province. The results of the research show that social interaction is influenced by several factors, such as kinship relations, patron-client, and local culture. These factors can be both drivers and obstacles to effective interaction. This research also recommends several strategies to increase the effectiveness of interactions, such as building open and transparent communication, increasing institutional capacity, and creating an atmosphere conducive to collaboration.

Keywords: village chief, BPD, social interaction, rural sociology.

Abstrak: Strategi untuk meningkatkan efektivitas interaksi meliputi komunikasi yang terbuka dan transparan, saling menghormati peran dan fungsi, serta membangun kepercayaan dan kerjasama. Kepala desa dan BPD sebagai dua pilar utama penyelenggaraan pemerintahan desa. Interaksi sosial yang efektif antara keduanya sangat penting untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi pedesaan untuk menganalisis interaksi sosial antara kepala desa dan BPD. Menggunakan metode kualitatif lokasi penelitian di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur. Untuk hasil dari pada penelitian menunjukkan interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti hubungan kekerabatan, patron-klien, dan budaya lokal. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi pendorong maupun penghambat interaksi yang efektif. Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa strategi untuk meningkatkan efektivitas interaksi, seperti membangun komunikasi yang terbuka dan transparan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan menciptakan suasana yang kondusif bagi kerjasama.

Kata kunci: Kepala Desa, BPD, Interaksi Sosial, Sosiologi Pedesaan.

1. PENDAHULUAN

Desa-desa sebenarnya seperti “republik kecil”, pemerintahan desa dibangun demokrasi ditingkat desa, atas dasar prinsip kedualatan rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat, *trias politica* sejatinya yang sudah berjalan ditingkat pusat juga juga diterapkan dengan bentuk secara tradisional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, desa-desa mengenal lurah (Kepala Desa) beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan eksekutif dan badan legislatif, Musyawarah Desa (rembug desa) sebagai pemegang keputusan tertinggi ditingkat desa (Isharyanto dan Dila, 2016:51). Pemerintahan desa di Indonesia mengalami transformasi signifikan, di mana desa didorong untuk lebih mandiri dan partisipatif. Desa sebagai pemerintahan terkecil di Indonesia, memiliki posisi yang sangat strategis secara politis dan sosiologis karena paling dekat dengan masyarakat. (Kushandajani, 2018:01). Dalam konteks ini, peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi semakin penting. Keberhasilan tata kelola desa yang baik sangat bergantung pada interaksi sosial yang efektif antara kedua aktor kunci ini.

Interaksi sosial kepala desa dengan BPD tidak sesederhana hubungan formal antara atasan dan bawahan. Dinamika interaksi diwarnai oleh berbagai faktor, seperti struktur sosial pedesaan, budaya

lokal, dan hubungan patron-klien. Memahami kompleksitas interaksi ini menjadi kunci untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara kepala desa dan BPD. Meskipun interaksi sosial kepala desa dengan BPD memiliki peran krusial, penelitian yang secara khusus mengkaji topik ini dalam perspektif sosiologi pedesaan masih terbilang minim. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana interaksi sosial tersebut memengaruhi kinerja dan efektivitas pemerintahan desa.

Dalam konteks ini, peran kepala desa dan Badan BPD menjadi semakin penting. Keberhasilan tata kelola desa yang baik sangat bergantung pada interaksi sosial yang efektif antara kedua aktor kunci ini. Kepala desa dan BPD merupakan dua aktor kunci dalam tata kelola desa yang baik. Interaksi sosial yang efektif antara kedua pihak sangat penting untuk membangun desa yang mandiri, partisipatif, dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memuat penjelasan terkait peran kepala desa sebagai pemimpin dan eksekutor, bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan program pembangunan, dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Kepala desa sebagai motivator dan inovator diharapkan mampu memotivasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, kepala desa juga perlu memiliki jiwa inovatif untuk menggali potensi desa dan menciptakan peluang baru bagi kesejahteraan masyarakat. Kepala desa sebagai komunikator dan negosiator sangat dibutuhkan kepala desa untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat desa, hingga tingkat provinsi dan pusat. Permendagri No. 110 Tahun 2017 Tentang BPD menyimpulkan Peran BPD sebagai Legislatif Desa memiliki fungsi sebagai legislasi dalam merencanakan, membahas dan kemudian menyepakati peraturan desa bersama pimpinan pemerintah desa yaitu kepala desa. BPD berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka. Kemudian, BPD menampung dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada kepala desa dan pemerintah desa. Sebagai pengawas kinerja, BPD bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja kepala desa dan perangkat desa.

Interaksi efektif antara Kepala Desa dan BPD, melakukan komunikasi dan koordinasi kunci utama interaksi yang efektif adalah komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Kepala desa dan BPD perlu menjalin komunikasi yang terbuka dan transparan untuk menghindari kesalahpahaman dan miskomunikasi. Kerjasama dan saling menghormati, keberhasilan tata kelola desa yang baik membutuhkan kerjasama dan saling menghormati antara kepala desa dan BPD. Kedua pihak perlu memahami peran dan fungsinya masing-masing, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kepala desa dan BPD harus memastikan bahwa masyarakat terlibat dan ikut langsung dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan. Ini termasuk memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana desa, dan mengembangkan ekonomi lokal desa (Patra, 2019:01). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi sosial antara kepala desa dan BPD dalam perspektif sosiologi pedesaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi interaksi, strategi untuk meningkatkan efektivitasnya, dan implikasinya terhadap tata kelola desa yang baik.

Berdasarkan latar belakang ini, dalam artikel ini akan dibahas beberapa hal, yaitu:

- 1) Bagaimana dampak interaksi sosial antara kepala desa dan BPD terhadap pembangunan desa?
- 2) Bagaimana perspektif sosiologi pedesaan dapat membantu memahami interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD?

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian dengan pendekatan studi kasus merupakan kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk deskripsi yang dikaitkan dengan teori dan temuan (Rizail dkk, 2022:78). Peneliti mengatakan bahwa studi kasus adalah cara terbaik untuk menyampaikan perspektif orang yang diteliti, memberikan gambaran yang luas tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, memberikan penjelasan tentang tabel yang diperlukan untuk penilaian, transferabilitas, dan penilaian konteks, yang semuanya berkontribusi pada pemahaman konteks.

2.2. Teknik Sampling

Menggunakan teknik sampling purposive, yaitu teknik sampel berdasarkan kriteria tertentu atau mempunyai standar yang telah ditetapkan untuk dijadikan sampel. Sampling purposive yaitu Peneliti menentukan kriteria mana yang digunakan untuk memilih sampel responden; kriteria ini dimaksudkan untuk menggambarkan demografi responden berdasarkan tujuan mereka (Abd. Hadi, 2021:52). Seperti Kepala Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa, Anggota BPD, dan Tokoh Masyarakat Di Desa Tanjungharjo.

2.3. Sumber Data dan Jenis Data

Pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer, informan triangulasi, data sekunder (Abd. Hadi, 2021:58). Data primer, triangulasi informan, dan sekunder adalah sumber data penelitian ini. Pengamatan langsung dan wawancara informan penelitian merupakan sumber data primer. Sementara itu data sekunder diperoleh peneliti dari rekaman foto yang diambil selama proses penelitian dan dimiliki oleh para informan sebagai pelengkap dari data sekunder.

2.4. Data Primer

Data utama yang diperoleh dari penelitian lapangan dikenal sebagai sumber data primer. Ada Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD.

2.4.1. Informan Triangulasi

Ada 3 informan triangulasi Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Umum

2.4.2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh terutama melalui dokumentasi, dan buku-buku di perpustakaan.

3. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa temuan terkait interaksi sosial antara BPD dan Kepala Desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja dan interaksi sosial yang baik BPD dengan Kepala Desa memiliki dampak positif terhadap pengambilan keputusan pembangunan fisik desa. Kolaborasi yang baik antara kedua pihak memberikan peluang untuk saling berbagi informasi, pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat, serta pemilihan alternatif solusi yang lebih baik. Interaksi sosial yang positif antara kepala desa dan BPD juga berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih efektif. Komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, dan saling menghormati antara kedua pihak membantu mengatasi perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan yang lebih baik.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam hubungan kerja dan interaksi sosial antara kepala desa dan BPD. Beberapa tantangan tersebut meliputi perbedaan pandangan dan kepentingan, kurangnya pemahaman tentang peran dan tugas masing-masing pihak, serta faktor-faktor politik dan kekuasaan yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Temuan penelitian ini bahwa pola interaksi sosial yang terjalin antara kepala desa dan BPD memiliki implikasi signifikan terhadap proses pengambilan keputusan, pengelolaan pembangunan, dan dinamika kehidupan sosial di desa.

3.1. Bentuk Interaksi Sosial

Hubungan timbal balik yang selalu berubah antara individu, kelompok, atau kelompok dengan individu dikenal sebagai hubungan interaksi sosial. Jenis hubungan ini dapat berupa kerja sama. Interaksi sosial adalah dasar dari proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan sosial yang dinamis (Sudaryanto, 2010:24). Interaksi sosial adalah proses timbal balik antara dua orang atau lebih yang memiliki pengertian satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi dan pertukaran antara individu atau kelompok dalam masyarakat disebut sebagai interaksi sosial. Ini mencakup semua jenis komunikasi, kontak fisik, dan pertukaran sosial yang terjadi di berbagai konteks sosial. Interaksi sosial dalam hubungan kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan desa. Hubungan antara keduanya seringkali ditandai dengan komunikasi dua arah, saling mempengaruhi, dan saling berbagi. Kepala Desa sebagai

pemimpin dan pengambil kebijakan di tingkat desa, memiliki peran penting untuk membawakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa. Sementara BPD berperan sebagai lembaga yang membantu merumuskan dan mengawasi kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa. Berikut adalah penjelasan tentang interaksi sosial ini:

BPD berfungsi sebagai lembaga dengan tugas dan fungsi yang diperlukan. Dengan adanya BPD, diharapkan keseimbangan kinerja tercapai dalam pengelolaan pemerintahan desa. Hubungan antara BPD dengan Kepala memiliki hubungan yang penting dalam pengembangan desa. Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan warga desa, sedangkan BPD memiliki fungsi pengawasan kepada Kepala Desa. Interaksi sosial antara BPD dan Kepala Desa merupakan proses komunikasi dan kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi pengawasan kepada Kepala Desa, yang melibatkan pengawasan kinerja dari pemerintah desa dan pengembangan program pembangunan. Interaksi sosial BPD dengan Kepala Desa sangat penting untuk pengembangan desa karena membantu meningkatkan keseimbangan kinerja dalam pengelolaan pemerintahan desa dan memfasilitasi masyarakat untuk membentuk peraturan desa. Interaksi sosial ke dua lembaga desa membantu meningkatkan keseimbangan kinerja dalam pengelolaan pemerintahan desa dan memfasilitasi masyarakat.

Interaksi sosial antara Kepala Desa dan BPD ini dapat berupa kerjasama, dimana keduanya saling bekerja sama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan desa. Hubungan ini bisa juga berupa konflik jika ada perbedaan pendapat atau jika salah satu pihak merasa kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan aspirasi atau kepentingan masyarakat desa. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif dan mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Interaksi sosial ini juga dapat berbentuk kompetisi jika BPD dan Kepala Desa memperebutkan pengaruh atau kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, perlu adanya pemahaman tentang peran dan fungsi masing-masing agar interaksi sosial ini bisa berlangsung seimbang dan produktif. Secara keseluruhan, interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui interaksi sosial yang sehat dan konstruktif, keduanya bisa saling melengkapi dan bekerja sama dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing.

3.2. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi ditingkat desa yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan pengelolaan administratif di sebuah desa. Tugas utama Kepala Desa meliputi menyelenggarakan pemerintah desa, dan mengatur berbagai aspek kehidupan di desa, seperti pembangunan, pelayanan publik, pembagian sumber daya, dan penyelesaian masalah masyarakat (Ulber Silalahi, 2019:78). Sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa, kepala desa bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan mengelola administrasi desa. Kepala desa juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan desa. Kepala Desa juga memiliki kewenangan dalam pemilihan dan pengangkatan perangkat desa serta harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa juga berperan dalam menjaga harmoni sosial, memfasilitasi partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, dan memajukan kesejahteraan desa.

Kesuksesan kepala desa dalam melayani dan mendukung masyarakat pada akhirnya akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi di tingkat pemerintahan desa dan pembangunan (Riant Nugroho, 2021:37). Sebagai pejabat publik, Kepala Desa memiliki wewenang untuk membuat keputusan terkait penggunaan anggaran desa, pelaksanaan program-program pembangunan, dan pemberian izin-izin tertentu dalam lingkup desa. Pada akhirnya, kesuksesan kepala desa dalam melayani dan mendukung masyarakat akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi di tingkat pemerintahan desa dan pembangunan. Sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, warga desa memilih kepala desa melalui pemilihan umum ditingkat desa atau pilkades. Pemilihan ini bertujuan untuk memastikan representasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan pemimpin desa yang kompeten dan berintegritas. Untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya, kepala desa memiliki tanggung jawab besar. Mereka diharapkan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik serta menjaga hubungan yang harmonis dengan warga desa untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan desa.

Oleh karena itu, kesimpulan dari penjelasan tentang kepala desa adalah bahwa orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat desanya diberi otoritas dan kepercayaan untuk memimpin, membina, dan mengembangkan desanya. Kepala Desa juga merupakan pemimpin pejabat pemerintah desa yang mengelola pemerintahan tingkat desa dan bertanggung jawab atas pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan kolaborasi. Kepala desa memiliki tugas utama dan fungsi untuk menjalankan pemerintahan desa, membangun sarana dan prasarana di tingkat desa, membina masyarakat desa, dan mendorong masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk tentang bagaimana bawahannya melakukan tugasnya. Selain itu, kepala desa memiliki wewenang untuk memimpin perangkat desa, menetapkan peraturan, dan mengelola keuangan desa. Pemerintahan desa harus terbuka untuk menerima pendapat masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menciptakan masyarakat madani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, melayani, dan menjaga hal-hal yang dianggap penting oleh masyarakat, dan mereka harus memiliki kemampuan untuk membangun masyarakat demokratis.

3.3. Badan Permusyawaratan Desa

BPD adalah lembaga perwakilan demokratis yang mengelola pemerintahan di tingkat desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pengawasan pemerintahan, dan anggota BPD ditunjuk sebagai "parlemen" desa dengan berbagai tugas dan wewenang, termasuk membahas dan membuat rancangan peraturan desa. BPD adalah "parlemen" desa dan memiliki banyak tanggung jawab, seperti membahas dan membuat peraturan desa, menampung dan menyebarkan aspirasi masyarakat desa, dan mengawasi kepala desa dan masa jabatan anggota BPD selama 6 tahun, dapat dipilih kembali dengan masa paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut atau tidak secara berturut-turut. BPD juga berperan dalam menyelenggarakan musyawarah desa, yang merupakan wadah bagi warga desa untuk memberikan pendapat, memberikan suara dalam pengambilan keputusan, dan terlibat dalam pembangunan desa. BPD lembaga legislatif di tingkat desa yang bertugas mewakili rakyat dalam pemerintahan desa.

BPD dibentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mempunyai peran penting untuk mewujudkan demokrasi dan pembangunan desa. BPD di Indonesia yang memiliki peran penting dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan dalam berbagai hal terkait pemerintahan dan pembangunan di desa. BPD bagian integral dari sistem pemerintahan desa yang berperan sebagai wakil dari warga desa dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 5 Ayat 1, anggota BPD mewakili masyarakat di tingkat desa melalui perwakilan wilayah dan perempuan yang dipilih secara demokratis melalui musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung. Jumlah keseluruhan anggota BPD pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, jumlah sedikit 5 (lima) anggota BPD dan jumlah terbanyak 9 (sembilan) anggota BPD.

Faktor-faktor historis yang memungkinkan pemerintah desa dan pemerintah supradesa untuk mengintervensi dinamika sosial politik yang berkembang di desa adalah bagian besar dari alasan hadirnya BPD. BPD secara luas terlibat dalam proses politik desa karena tuntutan regulasi. BPD mengelola aspirasi masyarakat di tingkat desa dan melakukan pengawasan. Oleh karena itu, BPD tidak hanya menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penghubung antara kepala desa dan masyarakat desa, tetapi juga dapat berfungsi sebagai lembaga yang mewakili masyarakat.

4. PEMBAHASAN

Interaksi sosial Kepala Desa dan BPD dalam perspektif sosiologi pedesaan, interaksi sosial antara kepala desa dan BPD merupakan aspek penting yang memengaruhi dinamika kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan di level desa. Jurnal ini mengkaji pola-pola interaksi sosial yang terjalin di antara kedua aktor kunci tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pola interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD terdapat dua pola interaksi sosial yang dominan kepala desa dengan BPD Pola Interaksi Kolaboratif, dalam pola ini, Kepala Desa dengan BPD menjalin hubungan yang sinergis dan saling terbuka dalam proses pengambilan keputusan di desa. Berbagi informasi, membahas isu-isu bersama, dan berusaha mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Terdapat saling pengertian dan penghargaan di antara kedua pihak dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.

Pola Interaksi Konfrontatif, dalam pola ini, kepala desa dengan BPD terlibat dalam relasi yang saling bertentangan, penuh ketegangan, dan konflik kepentingan. Masing-masing pihak cenderung mempertahankan posisi dan kekuasaannya, sehingga proses pengambilan keputusan kadang menjadi lebih sulit dan berpotensi memicu konflik. Pola interaksi sosial yang terjalin antara kepala desa dan BPD memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan, pengelolaan pembangunan, dan dinamika kehidupan sosial di desa. Pola interaksi yang kolaboratif cenderung menghasilkan keputusan dan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sementara pola interaksi konfrontatif dapat menghambat kemajuan desa dan memicu konflik internal.

Interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:

- a) Komunikasi: Terjadi komunikasi yang terbuka dan transparan antara kepala desa dengan BPD. Komunikasi ini dilakukan melalui berbagai media, seperti rapat, musyawarah desa, dan pertemuan informal.
- b) Kerjasama: Terjalin kerjasama yang baik antara kepala desa dengan BPD dalam berbagai aspek, seperti perencanaan pembangunan desa, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program desa.
- c) Koordinasi: Terjadi koordinasi yang baik kepala desa dengan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
- d) Sosialisasi: Kepala desa dan BPD bekerja sama dalam mensosialisasikan program dan kebijakan desa kepada masyarakat.

4.1. Faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial

Beberapa faktor yang mendukung interaksi sosial yang positif kepala desa dengan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro adalah:

- a) Adanya rasa saling percaya: Baik kepala desa maupun BPD saling percaya dan yakin bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun desa.
- b) Komunikasi yang efektif: Terjadi komunikasi yang efektif dan efisien antara kepala desa dan BPD. Hal ini memungkinkan mereka untuk saling memahami dan menyelesaikan permasalahan bersama.
- c) Komitmen bersama: Baik kepala desa maupun BPD memiliki komitmen yang kuat untuk membangun desa.
- d) Dukungan dari masyarakat: Masyarakat desa Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro mendukung interaksi sosial yang positif kepala desa dengan BPD.

4.2. Dampak Interaksi Sosial Terhadap Pembangunan Desa

Interaksi sosial yang positif kepala desa dengan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro memiliki dampak yang positif bagi pembangunan desa, antara lain:

- a) Meningkatkan partisipasi masyarakat: Masyarakat desa Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro lebih aktif dalam kegiatan desa karena mereka merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa.
- b) Meningkatkan kualitas pembangunan desa: Pembangunan desa di desa Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro menjadi lebih efektif dan efisien karena adanya kerjasama yang baik kepala desa dengan BPD.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Kesejahteraan masyarakat desa Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro meningkat karena program-program desa yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.3. Perspektif Sosiologi Pedesaan Dapat Membantu Memahami Interaksi Sosial Antara Kepala Desa dan BPD

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan perspektif sosiologi pedesaan, diperoleh beberapa hasil temuan terkait interaksi sosial kepala desa dengan BPD.

4.3.1. *Stratifikasi Sosial*

- a) Kepala desa dan BPD sering kali berasal dari strata sosial yang berbeda.
- b) Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam interaksi mereka.

Contohnya, kepala desa yang berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh mungkin memiliki lebih banyak power dibandingkan BPD yang berasal dari keluarga kurang mampu.

4.3.2. *Norma dan Nilai*

- a) Norma dan nilai yang berlaku di desa, seperti gotong royong dan musyawarah mufakat, mendorong mereka untuk bekerja sama dan menyelesaikan masalah bersama.

Contohnya, kepala desa dan BPD harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah pembangunan desa melalui musyawarah desa.

4.3.3. *Kekuasaan dan Pengaruh*

- a) Kepala desa memiliki kekuasaan formal yang lebih besar dari pada BPD.
- b) BPD memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan di desa karena mereka mewakili suara rakyat.
- c) Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam interaksi mereka, terutama ketika mereka memiliki pendapat yang berbeda tentang suatu masalah.

Contohnya, kepala desa memiliki hak veto atas keputusan BPD, tetapi BPD dapat menggunakan pengaruhnya untuk menekan kepala desa agar mempertimbangkan pendapat mereka.

4.3.4. *Patron-Klien*

- a) Hubungan patron-klien masih sering terjadi dalam interaksi antara kepala desa dan BPD. Kepala desa sebagai patron memberikan bantuan dan sumber daya kepada BPD sebagai klien.
- b) Hal ini dapat memengaruhi objektivitas BPD dalam menjalankan tugasnya.
- c) Contohnya, BPD yang menerima bantuan dari kepala desa mungkin akan lebih mendukung kebijakan kepala desa, meskipun kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur cukup positif dan harmonis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya komunikasi yang terbuka dan transparan, kerjasama yang saling menguntungkan, dan koordinasi yang baik. Faktor-faktor yang mendukung interaksi sosial yang positif Kepala Desa dengan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur adalah adanya rasa saling percaya, komunikasi yang efektif, dan komitmen bersama untuk membangun desa. Interaksi sosial yang positif Kepala Desa dengan BPD memiliki dampak yang positif bagi pembangunan desa, antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas pembangunan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan beberapa hal berikut untuk meningkatkan interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD:

- a) Memperkuat komunikasi dan koordinasi
- b) Meningkatkan kapasitas kepala desa dan BPD
- c) Membangun budaya demokrasi di desa
- d) Memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa

Direkomendasikan beberapa hal berikut untuk meningkatkan interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD, Memperkuat komunikasi dan koordinasi, Perlu dilakukan upaya untuk memperkuat komunikasi

dan koordinasi antara kepala desa dan BPD. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin, cukup positif dan harmonis.

- a) Faktor-faktor yang mendukung interaksi sosial yang positif antara Kepala Desa dan BPD di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro adalah adanya rasa saling percaya, komunikasi yang efektif, dan komitmen bersama untuk membangun desa.
- b) Interaksi sosial yang positif antara Kepala Desa dan BPD memiliki dampak yang positif bagi pembangunan desa, antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas pembangunan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perspektif sosiologi pedesaan memberikan kerangka yang berguna untuk memahami interaksi sosial Kepala Desa dengan BPD. Perspektif ini menunjukkan bahwa interaksi mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur sosial, norma dan nilai, kekuasaan dan pengaruh, dan patron-klien. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu meningkatkan kualitas interaksi kepala desa dengan BPD, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan beberapa hal berikut untuk meningkatkan interaksi sosial antara kepala desa dan BPD di Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan beberapa hal berikut untuk meningkatkan interaksi sosial Kepala Desa dan BPD:

- a) Memperkuat komunikasi dan koordinasi
- b) Meningkatkan kapasitas kepala desa dan BPD
- c) Membangun budaya demokrasi di desa
- d) Memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan beberapa hal berikut untuk meningkatkan interaksi sosial kepala desa dengan BPD, Memperkuat komunikasi dan koordinasi, Perlu dilakukan upaya untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi kepala desa dengan BPD. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin,

- a) Memperkuat komunikasi dan koordinasi
- b) Meningkatkan kapasitas kepala desa dan BPD
- c) Membangun budaya demokrasi di desa
- d) Memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa

Untuk meningkatkan interaksi sosial antara kepala desa dengan BPD, memperkuat komunikasi dan koordinasi, Perlu dilakukan upaya untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara kepala desa dan BPD. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin.

6. DAFTAR PUSTAKA

- I Gusti Lanang Patra Tanaya. 2019. *Musyawarah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Pusat Data Dan Informasi BALILATFO Kemendesa PDT. Jakarta.
- Isharyanto dan Dila Eka J.P. 2016. *Hukum Pemerintahan Desa*. Absolute Media. Yogyakarta.
- Kushandajani. 2018. *Hubungan kerja Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Perspektif UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa*. Departemen Politik Dan Pemerintahan FISIP Undip. Jakarta.
- Muhammad Rizal Pahleviannr. 2022. dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka. Sukoharjo.
- Riant Nugroho. 2021. *Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 1: Konsep Dasar*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sudariyanto. 2010. *Interaksi Sosial*. Alprin. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Ulber Silalahi. 2019. *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam*

Pembangunan Desa. Uwais Inspirasi Indonesia. Sidoarjo.

6.1. Peraturan Hukum

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Permendes No. 02 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Musyawarah Desa

Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Kepala Desa

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 05 Tahun 2019 Tentang BPD